

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AN YANG MELAKUKAN
PENADAHAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DARI POHON
MILIK PT. LNK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN**

RR. INDAH ROOSPITOWATI

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis yuridis terhadap Perkebunan yang berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional, sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan terhadap perkebunan kelapa sawit dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan perkebunan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan AN yang menadahkan Tandapan Buah Segar Kelapa Sawit tanpa izin hasil kebun milik orang lain, sehingga pelaku ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Perbuatan memanen tanpa ijin dari pemilik pohon Kelapa Sawit merupakan suatu perbuatan yang menurut UU Perkebunan dilarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena Kelapa Sawit merupakan salah satu hasil Perkebunan yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Konsideran huruf b UU Perkebunan. Selain itu salah satu tujuan penyelenggaraan Perkebunan adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana atas pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan Perkebunan Kepala Sawit. Hasil penulisan karya ilmiah ini menunjukkan bahwa bahwa perbuatan AN yang menadahkan tandapan buah segar kelapa sawit dari pohon milik PT. LNK dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dengan dasar bahwa AN yang telah melakukan penadahan dari hasil usaha perkebunan berupa 3 buah tandapan buah segar kelapa sawit milik PT. LNK yang berasal dari hasil pencurian yang dilakukan oleh AN adalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 111 UU Perkebunan. Terhadap perbuatan AN dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU perkebunan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran bilamana perbuatan yang dilakukan oleh AN ini merupakan suatu kebiasaan dan hal itu bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka hukuman yang diberikan kepada AN harus diberikan sanksi yang lebih maksimal, dan juga Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui kepolisian, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penadahan, Kelapa Sawit

**“AN” CRIME PENALTY BASED ON LAW NUMBER 39 OF 2014 ON
PLANTATION ESTATE DUE TO FENCING BUNC OF PALM OIL FRUITS**

RR. INDAH ROOSPITOWATI

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Abstract–This research is a juridical analysis of plantations that plays an important role and has great potential in national economic development, in connection with matters relating to the implementation of oil palm plantations can affect the objectives of plantation operations as regulated in legislation, research objectives this is to find out the AN actions that collect the Palm Oil Fresh Fruit Bunch without the permission of other people's garden produce, so that the perpetrators are reviewed based on Law Number 39 of 2014 concerning Plantation. The act of harvesting without permission from the owner of the Palm Tree is an act which according to the Law on Plantation is prohibited. This is because Oil Palm is one of the results of the Plantation which indirectly has an important role in the framework of realizing prosperity and prosperity of the community as mandated in the Consideration letter b of the Plantation Law. In addition, one of the objectives of the implementation of the Plantation is to provide protection to the Plantation Entrepreneurs and the community, therefore the authors are interested in discussing Criminal Liability for violations related to the management of the Palm Oil Plantation. The results of the writing of this scientific paper show that the AN actions that collect bunches of fresh palm oil from trees belonging to PT. LNK can be liable based on Law Number 34 of 2014 on the basis that AN which has made the extraction from the plantation business in the form of 3 pieces of palm oil fresh fruit belonging to PT. LNK originating from the results of theft carried out by AN is fulfilling the elements of criminal acts in Article 111 of the Plantation Law. The AN actions can be subject to the provisions stipulated in the Criminal Code and Plantation Law. Based on the foregoing, the author can give advice when the actions carried out by AN are a habit and it is contrary to the objectives of implementing plantations in order to realize prosperity and welfare of the people, then the punishment given to AN must be given more maximum sanctions, and also Community development which includes community empowerment through the police, fostering and developing forms of self-reliance security in order to increase community awareness and adherence to law and legislation.

Keywords: Crime Penalty, Palm Fruit, Fencing